

Marine Stewardship Council

Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC



Versi 1.0, 26 Oktober, 2022

Pernyataan Hak Cipta

“Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan” milik Marine Stewardship Council beserta isinya merupakan hak cipta milik “Marine Stewardship Council” - © “Marine Stewardship Council” 2022. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

Bahasa resmi Ketentuan ini adalah Bahasa Inggris. Versi definitif ketentuan ini berada di situs web MSC (msc.org). Segala ketidaksesuaian dengan salinan, versi atau terjemahan lain akan diselesaikan dengan merujuk pada versi Bahasa Inggris definitif.

MSC melarang segala bentuk modifikasi baik sebagian atau seluruh isi ketentuan ini.

Marine Stewardship Council
Marine House
1 Snow Hill
London EC1A 2DH
Britania Raya

Telp: + 44 (0) 20 7246 8900
Fax: + 44 (0) 20 7246 8901
Email: socialpolicy@msc.org

Pertanggungjawaban terhadap Ketentuan ini

Marine Stewardship Council (MSC) bertanggung jawab atas ketentuan-ketentuan ini.

Pembaca harus memverifikasi bahwa mereka menggunakan salinan terbaru dokumen ini beserta dokumen lainnya. Dokumen yang telah diperbarui, bersama dengan daftar induk seluruh dokumen MSC yang tersedia, dapat ditemukan pada situs web MSC ([msc.org](https://www.msc.org)).

Versi publikasi

Versi	Tanggal	Keterangan
1.0	26 Oktober 2022	Versi pertama dipublikasi.

Marine Stewardship Council

Visi

Visi kami adalah demi lautan dunia yang penuh dengan kehidupan, serta suplai makanan hasil laut terjaga untuk generasi kini dan masa depan.

Misi

Misi kami adalah untuk menggunakan ekolabel dan program sertifikasi perikanan untuk berkontribusi terhadap kesehatan lautan dunia dengan mengenali dan memberikan penghargaan terhadap praktik perikanan yang berkelanjutan, memberikan pengaruh pada pilihan masyarakat ketika membeli makanan hasil laut, dan bekerja dengan mitra kami untuk mengubah pasar makanan hasil laut menjadi berbasis berkelanjutan.

Pendahuluan umum

MSC telah mengembangkan standar untuk perikanan berkelanjutan dan jaminan Rantai Pengawasan makanan hasil laut yang berkelanjutan. Standar Perikanan MSC menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu industri perikanan supaya dapat mengklaim bahwa ikan produknya didapatkan dari sumber yang berkelanjutan dan dikelola dengan baik. Standar Rantai Pengawasan MSC memastikan bahwa ikan dan makanan hasil laut yang dijual dengan label ikan biru berasal dari perikanan yang bersertifikasi dan berkelanjutan sesuai Standar Perikanan MSC. Standar Rantai Pengawasan tersedia dan dapat digunakan oleh organisasi-organisasi terseleksi yang mengoperasikan skema sertifikasi. Saat ini Aquaculture Stewardship Council (ASC) telah terpilih untuk menggunakan Standar Rantai Pengawasan untuk seluruh produk makanan hasil laut bersertifikasi yang berasal dari tambak-tambak yang tersertifikasi ASC.

Setelah konsultasi dengan banyak pemangku kepentingan, MSC telah mengembangkan kebijakan mengenai praktik ketenagakerjaan pada entitas-entitas bersertifikasi MSC. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan meningkatkan jaminan tidak adanya praktik kerja yang berbahaya pada perikanan dan rantai suplai yang tengah dinilai atau bersertifikasi dengan standar MSC.

Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0 menggantikan syarat-syarat terkait ketenagakerjaan yang sebelumnya ada meliputi dokumen-dokumen normatif berikut:

- a. Proses Sertifikasi Perikanan MSC v2.2
- b. Ketentuan Sertifikasi Rantai Pengawasan MSC v3.1
- c. Standar Rantai Pengawasan MSC: Default v5.0; Kelompok v2.0; Organisasi yang Menghadapi Konsumen v2.0
- d. Ketentuan Audit Ketenagakerjaan Pihak Ketiga MSC v1.0
- e. Pernyataan Pemahaman Pemilik Sertifikat Rantai Pengawasan MSC mengenai Ketentuan Ketenagakerjaan
- f. Derogasi 7: Revisi Risiko Audit Ketenagakerjaan Rantai Pengawasan

Jangka waktu implementasi

Tanggal berlaku Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0

Tanggal publikasi: 26 Oktober 2022

Tanggal berlaku: 1 Mei 2023

Lembaga Penilai akan mengonfirmasi bahwa pemohon dan pemilik sertifikat perikanan dan Rantai Pengawasan telah memenuhi ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC menggunakan Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0.

Lembaga Penilai akan menggunakan Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0 sejak tanggal berlaku ketentuan ini. Lembaga Penilai dapat menggunakan ketentuan ini sejak tanggal publikasi apabila mereka beserta para klien mereka telah siap.

Tinjauan

MSC menerima komentar untuk dokumen ini. Komentar akan dipertimbangkan sebagai bagian dari proses peninjauan selanjutnya. Mohon ajukan komentar ke socialpolicy@msc.org.

Terkait dokumen ini

Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan

Dokumen ini berisi ketentuan untuk seluruh Lembaga Penilai yang menjalankan penilaian MSC, dan ketentuan Eligibilitas ketenagakerjaan yang wajib untuk organisasi rantai suplai dan perikanan yang menginginkan sertifikasi Rantai Pengawasan dan/atau Perikanan MSC.

Panduan

Panduan tidak wajib telah dimasukkan untuk membantu menginterpretasikan dan mengaplikasikan ketentuan ini. Panduan yang berhubungan dengan suatu bagian, atau terkait dengan isi dari suatu ayat spesifik, akan muncul di dalam kotak pada akhir bagian atau ayat.

Derogasi

Derogasi merupakan suatu tindakan normatif sementara yang memungkinkan ketentuan MSC diaplikasikan secara berbeda atau diabaikan. Derogasi diberikan sebagai jawaban dari kesalahan editorial, sebagai respon terhadap keadaan kahar (*force majeure*), di mana intensi tidak lagi sesuai dengan tujuan dan mengancam kredibilitas MSC, atau sebagai syarat untuk menguji suatu perubahan kebijakan atau untuk memodifikasi jangka waktu implementasi ketika mempublikasi versi dokumen normatif yang telah direvisi. Derogasi diumumkan dalam catatan publik di situs web MSC. MSC memerlukan Lembaga Penilai untuk mengikuti derogasi yang relevan.

Daftar Isi

1	Cakupan	Error! Bookmark not defined.
2	Dokumen normatif	8
3	Ketentuan eljibilitas untuk seluruh pemohon dan pemilik sertifikat MSC	8
3.1	Tidak ada kesalahan terhadap kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur	8
4	Tambahan ketentuan eljibilitas untuk pemohon dan pemilik sertifikat di laut	11
4.1	Pengajuan pernyataan kebijakan kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur oleh pemilik dan pemohon sertifikat di laut.....	11
5	Ketentuan eljibilitas tambahan bagi pemohon dan pemilik sertifikat Rantai Pengawasan di darat.....	13
5.1	Pengajuan penilaian mandiri atau penyelesaian audit ketenagakerjaan pihak ketiga	13
5.2	Pengajuan penilaian mandiri untuk kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur	14
5.3	Ketentuan audit ketenagakerjaan pihak ketiga	17
	Lampiran 1: Rangkuman deskripsi program audit ketenagakerjaan pihak ketiga yang diterima.....	2333

Ketentuan Eljibilitas Ketenagakerjaan MSC

1 Cakupan

Siapapun yang menghendaki penilaian dan/atau audit, serta sertifikasi untuk Perikanan MSC dan/atau standar Rantai Pengawasan, maka harus mematuhi bagian yang relevan pada dokumen ini.

2 Dokumen normatif

Dokumen-dokumen yang terdapat dalam daftar di bawah ini memiliki hal-hal yang, melalui referensi dalam teks ini, menjadi bagian dari Ketentuan Eljibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0

Untuk dokumen-dokumen dalam daftar di bawah merujuk pada versi terbaru yang berlaku.

Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah:

- a. Templat Pelaporan Ketentuan Eljibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut
- b. Formulir Penilaian Mandiri Ketenagakerjaan Rantai Pengawasan MSC
- c. Proses Sertifikasi Perikanan MSC
- d. Ketentuan Sertifikasi Umum MSC
- e. Derogasi 8: Ketentuan Eljibilitas Ketenagakerjaan Rantai Pengawasan
- f. Kosakata MSC-MSCI

3 Ketentuan eljibilitas untuk seluruh pemohon dan pemilik sertifikat MSC

3.1 Tidak ada kebersalahan untuk kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur

- 3.1.1 Pemohon atau pemilik sertifikat perikanan atau Rantai Pengawasan tidak diperbolehkan memiliki kesalahan dalam hal pelanggaran kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Panduan 3.1.1

Kerja Paksa: Definisi kerja paksa menurut International Labour Organisation (ILO) terdiri dari 2 elemen utama:

- Pekerjaan atau layanan diberikan di bawah ancaman hukuman, yang dapat berarti sanksi keuangan, hukuman fisik, atau hilangnya hak dan keuntungan atau pembatasan pergerakan (contohnya menolak perizinan akses dokumen identitas)
- Pekerjaan tidak sukarela.

Praktik tidak etis lain yang termasuk dalam kategori kerja paksa menurut ILO meliputi perbudakan, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan bentuk perbudakan modern lainnya.

Ketenagakerjaan di bawah umur: ILO mengartikan ketenagakerjaan di bawah umur sebagai pekerjaan yang berbahaya dan mengancam bagi anak baik secara mental, fisik, sosial ataupun moral, atau pekerjaan yang mengganggu sekolah mereka dengan merampas kesempatan mereka untuk bersekolah, mewajibkan mereka untuk putus sekolah atau menuntut mereka untuk berusaha menggabungkan bersekolah dengan pekerjaan yang terlalu berat dan panjang.

Kebersalahan dalam hal ini mengacu pada hasil formal dari kumpulan catatan resmi yang mengonfirmasi kesalahan dalam hal pelanggaran hukum kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur.

- 3.1.1.1 Pemohon atau pemilik sertifikat Rantai Pengawasan atau perikanan harus:
- a. Tidak melibatkan suatu entitas yang telah bersalah atas pelanggaran kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
 - b. Mendeklarasikan hubungan apapun terhadap entitas yang telah bersalah atas pelanggaran kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
 - c. Untuk pemohon dan pemilik sertifikat Rantai Pengawasan dan perikanan yang berada di laut, dokumen pada Bagian 1- (Kebersalahan terhadap Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur) pada Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut, mengenai apakah terdapat kebersalahan untuk kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
 - d. Mengecualikan, menyingkirkan dari sertifikat atau menjadikan tidak berlaku (*invalid*), *Entitas of Assessment (UoA)*/Entitas Penilaian atau *Entitas of Certification (UoC)*/Entitas Sertifikasi semua entitas yang terbukti bersalah atas pelanggaran kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur selama 2 tahun.
 - e. Menginformasikan segera semua entitas kepada Lembaga Penilai masing-masing apabila telah dikecualikan (atau dibuat tidak berlaku/*invalid*).

Panduan 3.1.1.1

Ketentuan ini berlaku pada kapal individual atau lokasi, atau kapal kelompok atau lokasi, yang berimplikasi dalam kesalahan suatu badan/entitas hukum (contohnya individu atau perusahaan) atas pelanggaran kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur. Hal ini ditujukan untuk menjamin bahwa pemohon atau pemilik sertifikat tidak melibatkan suatu entitas yang telah dituntut atas pelanggaran hukum kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur.

Pelanggaran yang menyebabkan kebersalahan tidak perlu dimunculkan dalam UoA.

“Entitas” dalam hal ini merujuk pada setiap lokasi atau kapal yang menjadi bagian pemohon atau pemilik sertifikat, baik yang dimiliki atau yang dikontrakkan atau disubkontrakkan oleh suatu lokasi dan/atau anggota MSC Rantai Pengawasan atau pemilik sertifikat perikanan (klien atau kelompok klien).

3.1.1.2 Lembaga Penilai harus:

- a. Mengonfirmasi pada saat permohonan awal, dan pada saat resertifikasi/pengawasan (*surveillance*) selanjutnya, bahwa pemohon atau pemilik sertifikat tidak melibatkan suatu entitas yang telah bersalah untuk pelanggaran kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur pada 2 tahun terakhir.
- b. Mempertimbangkan pemohon atau pemilik sertifikat sebagai tidak memenuhi syarat untuk audit, penilaian atau sertifikasi apabila:
 - i. Suatu entitas yang dimiliki oleh pemohon atau pemilik sertifikat (klien atau kelompok klien) telah bersalah atas pelanggaran kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur dalam 2 tahun terakhir, dan
 - ii. Entitas tersebut tidak ditarik (atau keanggotaan sertifikatnya tidak dianggap tidak berlaku) dari aplikasi ataupun sertifikat.
- c. Apabila suatu entitas yang telah menjadi bagian dari sertifikat menjadi bersalah atas pelanggaran kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur:
 - i. Tinjau dan konfirmasi bahwa pemilik sertifikat telah mengecualikan entitas yang terlibat, dan bahwa entitas tersebut tetap dikecualikan dari sertifikat atau status keanggotaan sertifikat mereka tetap tidak berlaku selama 2 tahun sejak tanggal hukuman.

Panduan 3.1.1.2.c.i

Contoh informasi yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi pemindahan entitas yang bersalah dapat meliputi daftar kapal yang diperbarui atau informasi keanggotaan kelompok klien yang diperbarui.

Untuk Rantai Pengawasan, suatu entitas dapat dikecualikan dari sertifikat dengan menjadikan status keanggotaan sertifikat entitas tersebut menjadi tidak berlaku.

- ii. Untuk perikanan, tinjau dan perbarui faktor-faktor penelusuran utama beserta risiko yang menyertai sesuai dengan kebutuhan dalam Proses Sertifikasi Perikanan MSC.

- iii. Untuk perikanan, konfirmasi risiko penelusuran dikelola dan dimitigasi sesuai kebutuhan di Proses Sertifikasi Perikanan MSC.
- iv. Untuk perikanan, tinjau dan perbarui penetapan sistem-sistem penelusuran sesuai kebutuhan di Proses Sertifikasi Perikanan MSC.

Panduan 3.1.1.2.ii-iv

Versi terbaru Proses Sertifikasi Perikanan MSC menerapkan hal-hal berikut:

- Untuk ketentuan terkait faktor penelusuran lihat Proses Sertifikasi Perikanan bagian MSC bagian 7.5.10.
 - Untuk ketentuan terkait manajemen dan mitigasi risiko penelusuran lihat Proses Sertifikasi Perikanan MSC bagian 7.17.
 - Untuk ketentuan terkait penetapan sistem penelusuran lihat Proses Sertifikasi Perikanan bagian MSC bagian 7.17.
- v. Untuk perikanan, perbarui daftar kapal dengan sewajarnya dan unggah ke skema basis data.
 - vi. Untuk perikanan dan Rantai Pengawasan, perbarui status sertifikat pada skema basis data dengan sewajarnya.
 - vii. Untuk perikanan dan Rantai Pengawasan, perbarui dokumen sertifikasi lain yang relevan.
- d. Tangguhkan pemilik sertifikat sesuai [Ketentuan Sertifikasi Umum MSC Bagian 7.4 \(Penangguhan atau penarikan sertifikasi\)](#), apabila pemilik sertifikat tidak dapat menarik diri dari sertifikat, atau jadikan status keanggotaan sertifikat suatu entitas yang bersalah menjadi tidak berlaku.

4 Ketentuan eligibilitas tambahan untuk pemohon dan pemilik sertifikat di laut

4.1 Permohonan pernyataan kebijakan kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur oleh pemohon dan pemilik sertifikat di laut

Panduan Bagian 4.1

“Pemohon dan pemilik sertifikat di laut” mengacu pada pemohon dan pemilik sertifikat perikanan, termasuk perikanan yang beroperasi di danau dan sungai, dan pada pemohon atau pemilik sertifikat Rantai Pengawasan yang beroperasi di laut.

4.1.1 Pemohon atau pemilik sertifikat (klien atau kelompok klien) harus:

- a. Menggunakan bagian ‘Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan’ (Bagian 2) dari Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut untuk rincian kebijakan, praktik, serta

Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0

tindakan yang berlaku untuk menjamin tidak adanya kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur.

- b. Mengajukan Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut dengan bagian 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan' yang telah dilengkapi kepada Lembaga Penilai pada waktu yang sama dengan pengajuan Daftar Periksa (*Checklist*) Dokumen Klien untuk perikanan, atau pada hari yang sama atau sebelum audit untuk entitas-entitas Rantai Pengawasan di laut.
- c. Menjamin bahwa informasi yang diberikan dalam templat meliputi seluruh entitas, lokasi, dan kontraktor dalam cakupan sertifikat.
- d. Memperbarui bagian 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan' dari Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut ketika terdapat perubahan yang memengaruhi praktik kerja mereka dan berikan ini kepada Lembaga Penilai untuk diunggah ke skema basis data.
- e. Meninjau informasi dalam bagian 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan' dari Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut selama tiap audit pengawasan/surveillans dan perbarui apabila terdapat perubahan apapun.

Panduan 4.1.1

Pemohon atau pemilik sertifikat mungkin lebih nyaman menggunakan templat terpisah di mana terdapat perbedaan praktik di seluruh perikanan. Tidak ada batasan bagi klien untuk melakukan ini dan skema basis data memperbolehkan lebih dari satu templat untuk diunggah.

4.1.2 Lembaga Penilai harus:

- a. Mengonfirmasi bahwa seluruh bagian 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan' dari Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut' telah dilengkapi.
- b. Mengonfirmasi dengan pemohon atau pemilik sertifikat bahwa isi dari bagian 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan' dari Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut mencakup seluruh entitas, lokasi, dan kontraktor dalam cakupan sertifikat.
- c. Mengunggah Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut (termasuk bagian Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan yang dilengkapi oleh pemohon atau pemilik sertifikat ke skema basis data, dan (hanya untuk perikanan) untuk publikasi pada situs web MSC bersamaan dengan Laporan Sertifikasi Publik.
- d. Mempertimbangkan pemohon atau pemilik sertifikat sebagai tidak memenuhi syarat untuk penilaian atau sertifikasi apabila bagian 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan' tidak dilengkapi dan diajukan kepada Lembaga Penilai.

Panduan 4.1.2

Lembaga Penilai tidak diharuskan mengaudit kelengkapan informasi yang terkandung pada 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan' yang telah diajukan oleh pemohon atau pemilik sertifikat.

Meskipun Templat Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC di Laut (termasuk bagian 'Kebijakan Kerja Paksa dan Ketenagakerjaan di Bawah Umur Pemilik Sertifikat MSC, Praktik dan Tindakan') untuk perikanan harus diajukan bersamaan dengan Daftar Periksa (*Checklist*) Dokumen Klien untuk perikanan, templat hanya akan dipublikasi pada situs web MSC ketika Laporan Sertifikasi Publik dipublikasi.

Laporan templat untuk Rantai Pengawasan di laut tidak dipublikasi pada situs web MSC.

5 Ketentuan eligibilitas tambahan untuk pemohon Rantai Pengawasan dan pemilik sertifikat di darat

Panduan Bagian 5

Apabila pemohon atau pemilik sertifikat beroperasi di laut (contohnya suatu kapal pengolahan), maka merujuk pada Bagian 4 (Ketentuan untuk pemohon dan pemilik sertifikat perikanan dan rantai suplai di laut).

5.1 Pengajuan penilaian mandiri atau penyelesaian audit ketenagakerjaan pihak ketiga

5.1.1 Ketentuan pada Bagian 5 berlaku untuk setiap pemohon atau pemilik sertifikat dengan 1 atau lebih kegiatan di bawah ini dalam cakupan sertifikat Rantai Pengawasan mereka:

- a. Pemrosesan kontrak
- b. Penurunan (*Off-loading*) secara manual
- c. Pengepakan (*Packing*) atau pengepakan ulang (*repacking*)
- d. Pengolahan primer
- e. Pengolahan sekunder
- f. Pengolahan pengawetan
- g. Pengolahan lain
- h. Penggunaan subkontraktor

Panduan 5.1.1

Pemohon atau pemilik sertifikat Rantai Pengawasan yang tidak memiliki kegiatan apapun pada cakupan a-g tersebut tidak harus memenuhi ketentuan eligibilitas ketenagakerjaan pada bagian ini. Bagi subkontraktor yang tidak bersertifikasi, hanya subkontraktor yang menjalankan kegiatan dalam cakupan b-g yang harus memenuhi ketentuan eligibilitas ketenagakerjaan dalam bagian ini.

5.1.2 Apabila seorang pemohon atau pemilik sertifikat memenuhi 5.1.1, maka supaya dapat memenuhi syarat untuk audit atau sertifikasi, maka mereka harus:

- a. Memberikan penilaian mandiri praktik ketenagakerjaan dan menandatangani perjanjian untuk melengkapi audit ketenagakerjaan apabila diperlukan oleh MSC sesuai dengan Bagian 5.2 (Pengajuan penilaian mandiri kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur).

ATAU

- b. Memberikan bukti telah menyelesaikan audit ketenagakerjaan di lapangan yang sesuai dengan ketentuan pada Bagian 5.3 (Ketentuan audit ketenagakerjaan pihak ketiga MSC).

5.1.3 Lembaga Penilai harus:

- a. Mengonfirmasi pada permohonan awal dan audit selanjutnya apakah pemohon atau pemilik sertifikat telah memilih untuk 5.1.2.a atau 5.1.2.b.
- b. Mendokumentasikan pilihan pemohon atau pemilik sertifikat dalam skema basis data Rantai Pengawasan.
- c. Mengikuti ketentuan dalam Bagian 5.2 apabila pemohon atau pemilik sertifikat memilih untuk mengajukan penilaian mandiri kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur.
- d. Mengikuti ketentuan pada Bagian 5.3 apabila pemohon atau pemilik sertifikat memilih audit ketenagakerjaan pihak ketiga.
- e. Melanjutkan audit Rantai Pengawasan apabila ketentuan 5.1.2 dipenuhi.

5.2 Pengajuan penilaian mandiri kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur

5.2.1 Pemohon atau pemilik sertifikat harus:

- a. Menggunakan 'Formulir Penilaian Mandiri Rantai Pengawasan MSC' ("formulir penilaian mandiri") untuk rincian kebijakan, praktik dan tindakan yang berlaku untuk menjamin tidak adanya kerja paksa dan ketenagakerjaan di bawah umur.
- b. Melengkapi satu (atau lebih, sesuai kebutuhan) formulir penilaian mandiri per sertifikat.
- c. Menjamin bahwa informasi penilaian mandiri meliputi seluruh lokasi dan subkontraktor dalam cakupan sertifikat.

Panduan 5.2.1.c

Formulir penilaian mandiri terpisah dapat diisi oleh subkontraktor ketika subkontraktor sulit atau tidak mungkin dilibatkan dengan pemohon atau pemilik sertifikat.

- d. Mengikuti instruksi dalam formulir penilaian mandiri dan melengkapi seluruh bagian dalam penilaian mandiri.
- e. Melengkapi formulir penilaian mandiri pada hari atau sebelum audit Rantai Pengawasan.
- f. Menandatangani bagian dalam formulir penilaian mandiri untuk menyetujui kelengkapan audit ketenagakerjaan apabila diperlukan oleh MSC.
- g. Meninjau formulir penilaian setiap tahun sebagai bagian proses audit Rantai Pengawasan dan memperbarui apabila terdapat perubahan apapun.
 - i. Isi harus menggambarkan setiap perubahan seperti keterlibatan dengan program audit sosial baru atau perubahan pada cakupan sertifikat Rantai Pengawasan.
- h. Menyetujui audit ketenagakerjaan yang dipersyaratkan MSC apabila diperlukan oleh MSC.
 - i. Pemohon atau pemilik sertifikat harus mengakui tanda terima notifikasi seleksi mereka dalam 5 hari.
 - ii. Memperkenalkan audit untuk diselesaikan tidak lebih dari 6 bulan setelah diberikan notifikasi seleksi oleh MSC.
 - iii. Permohon atau pemilik sertifikat harus memberikan hasil dari segala audit yang diperlukan oleh MSC kepada Lembaga Penilai mereka dalam 30 hari setelah tanda terima.
- i. Memberikan notifikasi kepada Lembaga Penilai mereka, apabila pemohon atau pemilik sertifikat tengah berpartisipasi dalam suatu audit ketenagakerjaan dari pihak ketiga yang sah dan menjadikan hasilnya tersedia untuk Lembaga Penilai mereka sesuai dengan Tabel 1.

5.2.2 Lembaga Penilai harus:

- a. Mengirimkan salinan formulir penilaian mandiri kepada pemohon atau pemilik sertifikat secepat mungkin, sebelum audit Rantai Pengawasan, apabila Lembaga Penilai menetapkan bahwa ketentuan 5.1.1 telah dipenuhi.
- b. Apabila pemohon atau pemilik sertifikat telah memilih 5.1.2.a, konfirmasi bahwa formulir penilaian mandiri dilengkapi pada hari atau sebelum audit Rantai Pengawasan.
- c. Dokumentasikan pada skema basis data bahwa pemohon atau pemilik sertifikat telah melengkapi formulir penilaian mandiri
- d. Mewajibkan pemohon atau pemilik sertifikat untuk menandatangani bagian dalam formulir penilaian mandiri menyetujui audit ketenagakerjaan apabila diperlukan oleh MSC.

- e. Mengunggah formulir penilaian mandiri yang telah dilengkapi ke skema basis data.
- f. Mempertimbangkan pemohon atau pemilik sertifikat sebagai tidak memenuhi syarat untuk audit atau sertifikasi Rantai Pengawasan apabila ketentuan 5.2.1 (atau 5.3.1 sebagai alternatif) tidak dipenuhi.
 - i. Lembaga Penilai tidak diperbolehkan melanjutkan proses audit apabila pemohon menjadi tidak memenuhi syarat untuk audit Rantai Pengawasan sesuai ketentuan 5.2.2.f.
 - ii. Lembaga Penilai harus menanggukkan pemilik sertifikat sesuai [Ketentuan Sertifikasi Umum MSC Bagian 7.4 \(Penangguhan atau penarikan sertifikasi\)](#) apabila pemilik sertifikat menjadi tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi Rantai Pengawasan sesuai ketentuan 5.2.2.f.
- g. Mengikuti ketentuan pada 5.3.2.f apabila pemilik sertifikat terpilih untuk audit yang dipersyaratkan MSC sesuai ketentuan 5.2.1.h.

Panduan 5.2.2

Formulir penilaian mandiri harus dikirimkan terlebih dahulu kepada pemohon atau pemilik sertifikat untuk menjamin bahwa mereka memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi formulir sebelum audit. Lembaga Penilai tidak bertanggung jawab untuk verifikasi akurasi tanggapan yang diberikan dalam kuisisioner penilaian mandiri, hanya memastikan bahwa formulir telah lengkap dan informasi diberikan sebagai jawaban terhadap seluruh pertanyaan.

Panduan 5.2.1–2

Secara berkelanjutan, MSC akan menggunakan kombinasi pendekatan secara acak, berbasis risiko dan/atau berbasis risiko bertingkat untuk mengidentifikasi pemilik sertifikat untuk audit ketenagakerjaan sesuai ketentuan 5.1.2.a. MSC mewajibkan pemilik sertifikat yang diidentifikasi melalui proses ini untuk diaudit terhadap salah satu program yang terdaftar pada Tabel 1 atau terhadap audit yang dipersyaratkan dan akan memberikan notifikasi pada pemilik sertifikat yang terseleksi sesuai dengan hal itu.

Sesuai ketentuan 5.2.1.h, pemilik sertifikat yang terseleksi untuk audit yang dipersyaratkan MSC diwajibkan untuk:

- a. Mengakui tanda terima notifikasi seleksi mereka dalam 5 hari tanda terima.
- b. Memperkenankan audit untuk diselesaikan dalam periode waktu tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal email notifikasi seleksi.
- c. Memberikan hasil audit yang dipersyaratkan kepada Lembaga Penilai mereka dalam 30 hari tanda terima.

Sesuai ketentuan 5.2.2.g, Lembaga Penilai diwajibkan untuk mengikuti ketentuan 5.3.2 untuk klien yang telah terseleksi untuk audit yang dipersyaratkan MSC.

5.3 Ketentuan audit ketenagakerjaan pihak ketiga

Panduan 5.3

Bagian ini hanya berlaku untuk pemohon atau pemilik sertifikat yang memilih untuk melengkapi audit ketenagakerjaan di lapangan sesuai ketentuan 5.1.2.b.

- 5.3.1 Apabila pemohon atau pemilik sertifikat memilih untuk melengkapi audit ketenagakerjaan di lapangan sesuai ketentuan 5.1.2.b, pemohon atau pemilik sertifikat harus:
- a. Melengkapi audit ketenagakerjaan pihak ketiga yang independen dengan salah satu program berikut yang diakui oleh MSC:
 - i. Audit amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI).
 - ii. SEDEX's Sedex Members Ethical Trace Audit (SMETA).
 - iii. Social Accountability International's SA8000 Certification.
 - iv. Brand Reputation Compliance Global Standards (BRCGS) Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard (ETRS).
 - v. Program-program (untuk manufaktur dan pengolahan) yang diakui oleh Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI).
 - b. Penuhi kriteria kinerja program audit ketenagakerjaan yang relevan dan berikan bukti ini sesuai ketentuan pada Tabel 1.

Panduan 5.3.1.b

Bukti yang perlu diberikan oleh organisasi kepada auditor mereka akan bergantung pada program audit ketenagakerjaan yang diaudit.

Lihat Lampiran 1 untuk ringkasan deskripsi tiap program pihak ketiga yang sah.

- c. Berikan bukti bahwa lokasi dan subkontraktor yang relevan mematuhi ketentuan 5.3.1.a–b pada setiap audit.
 - d. Informasikan Lembaga Penilai dalam 2 hari apabila terdapat lokasi atau subkontraktor yang tidak mematuhi ketentuan 5.3.1.a–b.
 - e. Selesaikan segala Zero Tolerance (Amfori BSCI) atau segala temuan Business Critical (SEDEX SMETA) dalam kurun waktu 30 hari.
- 5.3.1.1 Audit ketenagakerjaan pihak ketiga harus dilakukan di lapangan, kecuali apabila keadaan luar biasa terjadi, dan dalam kondisi-kondisi berikut:
- a. Program audit ketenagakerjaan pihak ketiga yang telah diakui telah menyetujui pendekatan alternatif untuk audit berbasis lokasi (contohnya audit jarak jauh).

- b. Program telah menentukan kondisi-kondisi di mana alternatif untuk audit berbasis lokasi tersebut dapat diterima.
- c. Kondisi-kondisi yang ditentukan tersebut dipenuhi dalam pelaksanaan audit.

Panduan 5.3.1.1

Keadaan luar biasa dapat meliputi, misalnya, pembatasan perjalanan atau akses yang diberlakukan oleh otoritas setempat, yang menghalangi perjalanan dari dan ke suatu lokasi atau subkontraktor relevan.

Tabel 1: Ketentuan Lembaga Penilai dan pemohon/pemilik sertifikat untuk menunjukkan kepatuhan

Program audit ketenagakerjaan	Kriteria kinerja untuk pemohon atau pemilik sertifikat	Tindakan dan bukti berkelanjutan yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Lembaga Penilai
amfori BSCI	<ul style="list-style-type: none"> • Berhasil menyelesaikan audit pihak ketiga amfori BSCI dengan tanpa masalah Zero Tolerance. • Menjalankan audit amfori BSCI yang berlaku/<i>valid</i>. 	<p>Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus masuk ke platform [keberlanjutan] amfori dan menampilkan halaman yang menunjukkan nama dan alamat perusahaan. • Harus memberikan auditor Rantai Pengawasan informasi mengenai segala kasus Zero Tolerance dan apakah kasus tersebut telah diselesaikan, termasuk segala Zero Tolerance yang muncul di luar audit Rantai Pengawasan. <p>Lembaga Penilai harus mengonfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit yang tersedia dalam amfori BSCI. • Lokasi tidak memiliki masalah Zero Tolerance. • Apabila suatu Zero Tolerance muncul setelahnya, Lembaga Penilai harus diberikan notifikasi dalam 2 hari dan masalah Zero Tolerance diselesaikan dalam 30 hari. <p>Apabila tidak terdapat masalah Zero Tolerance dan audit belum kadaluwarsa, organisasi telah berhasil</p>

Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0

Program audit ketenagakerjaan	Kriteria kinerja untuk pemohon atau pemilik sertifikat	Tindakan dan bukti berkelanjutan yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Lembaga Penilai
		<p>menunjukkan bahwa organisasi tersebut mematuhi ketentuan Eligibilitas ketenagakerjaan MSC.</p> <p><i>Informasi mengenai Zero Tolerances akan diverifikasi silang secara rutin oleh amfori BSCI dan MSC.</i></p>
<p>Social Accountability International (SAI) SA8000 Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat SA8000 yang berlaku/<i>valid</i>. 	<p>Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Harus menyediakan salinan sertifikat SA8000 kepada auditor Rantai Pengawasan untuk dicek via SA8000 Alat Pencarian Sertifikasi (<i>Certification Search Tool</i>). <p>Lembaga Penilai harus mengonfirmasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa informasi perusahaan sesuai dengan rincian pada sertifikat. Status sertifikasi perusahaan. <p>Apabila organisasi memiliki sertifikat SA8000 yang berlaku/<i>valid</i> (yaitu tidak ditangguhkan), organisasi telah berhasil menunjukkan kepatuhannya dengan ketentuan eligibilitas ketenagakerjaan MSC.</p>
<p>SEDEX Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berhasil melengkapi audit pihak ketiga SEDEX SMETA tanpa Masalah Kritis Bisnis. Melengkapi audit tahunan. 	<p>Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Harus masuk ke platform SEDEX untuk mengonfirmasi tautan antara MSC dan pemohon atau pemilik sertifikat, dan untuk menunjukkan hasil audit SMETA kepada auditor Rantai Pengawasan. <p>Lembaga Penilai harus mengonfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat masalah <i>Business Critical</i>. Apabila masalah <i>Business Critical</i> muncul kemudian, auditor harus diberikan notifikasi dalam 2 hari setelah audit dipublikasi pada sistem

Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0

Program audit ketenagakerjaan	Kriteria kinerja untuk pemohon atau pemilik sertifikat	Tindakan dan bukti berkelanjutan yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Lembaga Penilai
		<p>dan masalah Business Critical diselesaikan dalam 30 hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> Audit dilaksanakan dalam 12 bulan sebelumnya. <p>Apabila organisasi memiliki sertifikat SEDEX SMETA yang berlaku/<i>valid</i> (yaitu tidak ditangguhkan) dan tidak ada masalah Business Critical, maka organisasi telah berhasil menunjukkan kepatuhannya pada ketentuan Eligibilitas ketenagakerjaan MSC.</p>
<p>Etika Perdagangan BRCGS dan Standar Sumber yang Bertanggung Jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat BRCGS yang berlaku/<i>valid</i>. 	<p>Organisasi harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan salinan Etika Perdagangan BRCGS dan Standar Sumber yang Bertanggung Jawab untuk auditor Rantai Pengawasan agar dapat memeriksa pada situs web BRCG. <p>Lembaga Penilai harus mengonfirmasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa informasi perusahaan sesuai dengan rincian pada sertifikat. Status sertifikasi perusahaan. <p>Apabila organisasi memiliki Etika Perdagangan BRCGS dan Standar Sumber yang Bertanggung Jawab (yaitu tidak ditangguhkan) yang berlaku/<i>valid</i>, maka organisasi telah berhasil menunjukkan kepatuhannya kepada ketentuan eligibilitas ketenagakerjaan MSC.</p>
<p>Program (manufaktur dan pengolahan) yang diakui oleh SSCI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat yang berlaku/<i>valid</i> dari program yang diakui. 	<p>Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Harus memberikan salinan sertifikat kepada auditor Rantai Pengawasan untuk pengecekan. <p>Lembaga Penilai harus mengkonfirmasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa informasi perusahaan sesuai dengan detail pada sertifikat. Status sertifikasi perusahaan.

Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan MSC v1.0

Program audit ketenagakerjaan	Kriteria kinerja untuk pemohon atau pemilik sertifikat	Tindakan dan bukti berkelanjutan yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Lembaga Penilai
		Apabila organisasi memiliki sertifikat yang berlaku/ <i>valid</i> dari program yang diakui oleh SSCI maka organisasi telah berhasil menunjukkan kepatuhannya kepada ketentuan Eligibilitas ketenagakerjaan MSC.

5.3.2 Lembaga Penilai harus:

- a. Mencatat pada skema basis data bahwa pemohon atau pemilik sertifikat telah menyelesaikan audit di lapangan (atau audit jarak jauh pada keadaan luar biasa) untuk program ketenagakerjaan pihak ketiga yang diakui oleh MSC.
- b. Memverifikasi bahwa kriteria kinerja telah dipenuhi sesuai dengan Tabel 1 untuk pemohon atau pemilik sertifikat.
- c. Mempertimbangkan pemohon sebagai tidak memenuhi syarat untuk audit Rantai Pengawasan apabila ketentuan pada 5.3.1 (atau alternatifnya pada 5.2.1) tidak dipenuhi.
- d. Menanggihkan pemilik sertifikat sesuai dengan [Ketentuan Sertifikasi Umum MSC Bagian 7.4 \(Penangguhan atau penarikan sertifikasi\)](#) apabila pemilik sertifikat tidak menginformasikan Lembaga Penilai dalam 2 hari setelah lokasi atau subkontraktor mereka, di mana ketentuan-ketentuan ini berlaku, tidak dapat memenuhi 5.3.1.a–b.
 - i. Lembaga Penilai tidak dapat menanggihkan pemilik sertifikat apabila status keanggotaan sertifikat untuk lokasi atau subkontraktor yang menjadi sumber temuan menjadi tidak berlaku/*invalid*.
- e. Menanggihkan pemilik sertifikat sesuai [Ketentuan Sertifikasi Umum MSC Bagian 7.4 \(Penangguhan atau penarikan sertifikasi\)](#), apabila temuan Zero Tolerance (amfori BSCI) atau Business Critical (SEDEX SMETA) yang telah diinformasikan oleh Lembaga Penilai dalam 2 hari tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari.
 - i. Lembaga Penilai tidak dapat menanggihkan pemilik sertifikat apabila status keanggotaan sertifikat lokasi atau subkontraktor yang menjadi sumber temuan menjadi tidak berlaku/*invalid*.
- f. Menanggihkan pemilik sertifikat sesuai [Ketentuan Sertifikasi Umum MSC Bagian 7.4 \(Penangguhan atau penarikan sertifikasi\)](#), apabila pemilik sertifikat terpilih untuk menjalankan audit yang dipersyaratkan MSC dan lokasi atau subkontraktor tidak dapat menyelesaikan temuan kerja paksa atau ketenagakerjaan di bawah umur yang kritis dari audit yang dipersyaratkan MSC dalam kurun waktu 30 hari.
 - i. Lembaga Penilai tidak dapat menanggihkan pemilik sertifikat apabila status keanggotaan sertifikat lokasi atau subkontraktor yang menjadi sumber temuan menjadi tidak berlaku/*invalid*.

- g. Ketika menanggihkan pemilik sertifikat, tetapkan periode penanggihan minimum 3 bulan, atau hingga pemilik sertifikat mematuhi Ketentuan Eligibilitas Ketenagakerjaan, manapun periode yang lebih panjang, sesuai [Ketentuan Sertifikasi Umum MSC Bagian 7.4 \(Penanggihan atau penarikan sertifikasi\)](#).

Panduan 5.3.2

Dalam merencanakan audit, Lembaga Penilai membutuhkan konfirmasi apakah orang yang dapat dihubungi untuk Rantai Pengawasan juga bertanggung jawab atas audit kepatuhan di organisasi. Jika tidak, maka Lembaga Penilai perlu untuk mengonfirmasi bahwa orang yang bertanggung jawab untuk kepatuhan sosial di organisasi telah diberikan notifikasi atas segala tanggungjawab selama audit Rantai Pengawasan. Hal ini khususnya sangat penting untuk BSCI dan SEDEX.

Lampiran 1: Rangkuman deskripsi program audit pihak ketiga yang berlaku

amfori BSCI

amfori BSCI merupakan suatu sistem uji kelayakan yang mendukung *brand* perusahaan-perusahaan, importir dan ritel untuk mendorong peningkatan dan kinerja sosial dalam pabrik dan tambak pada rantai suplai global mereka. Amfori BSCI menggunakan pendekatan holistik dan menyediakan serangkaian alat, sumber daya dan kegiatan untuk mendukung anggotanya dalam meningkatkan keberlanjutan sosial, meliputi:

- Visibilitas rantai suplai.
- Monitoring efektif dan deteksi dini pelanggaran hak asasi manusia pada rantai suplai global.
- Meningkatkan kesadaran di antara bisnis dan mitra bisnis.
- Melakukan tindakan preventif, peningkatan kontinu dan implementasi praktik yang baik.
- Membagikan informasi dan mempengaruhi pelaku kunci untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan pada rantai suplai.
- Perbaiki efektif praktik pekerjaan yang kasar/kejam.

amfori BSCI beroperasi menggunakan model peningkatan kontinu. Hal ini berarti bahwa tidak ada sertifikasi (tidak ada Lulus/Gagal). Peringkat keseluruhan dari audit amfori BSCI, berkisar dari A sampai E, menggambarkan derajat di mana para pihak yang diaudit telah mengintegrasikan Kode Etik dan Ketentuan Implementasi amfori BSCI ke dalam kultur dan operasi bisnis harian. Peringkat ini tidak dikalkulasi oleh auditor namun dihasilkan secara otomatis oleh sistem TI amfori BSCI berdasarkan kombinasi peringkat meliputi 13 Area Performa.

Untuk audit bernilai A dan B, validitas auditnya adalah 2 tahun, dan audit lanjutan (*follow-up*) tidak diperlukan (juga tidak mungkin melalui sistem) untuk sementara waktu. Untuk audit bernilai C sampai E, audit lanjutan (*follow-up*) harus dilaksanakan dalam 12 bulan sejak audit secara menyeluruh. Apabila audit lanjutan (*follow-up*) bernilai C sampai E, audit lanjutan (*follow-up*) yang lain selanjutnya jatuh tempo dalam 12 bulan sejak audit lanjutan (*follow-up*) pertama. Ketika pelanggaran hak asasi manusia berat dideteksi selama audit, Zero Tolerance akan terpicu dan proses perbaikan akan segera dimulai. Amfori BSCI memfasilitasi perbaikan kasus hingga 3 bulan setelah peringatan Zero Tolerance.

SA8000

SA8000 merupakan suatu program sertifikasi sosial untuk pabrik dan organisasi. Program ini menilai kinerja sosial pada 8 area yang penting untuk akuntabilitas sosial di tempat kerja, yang ditempatkan oleh element sistem manajemen.

SA8000 beroperasi dengan model sertifikasi Lulus/Gagal (seperti pada program Perikanan dan Rantai Pengawasan MSC) dan mewajibkan entitas-entitas untuk memenuhi seluruh ketentuan spesifik agar dapat lulus.

SEDEX

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) merupakan platform yang mendukung usaha terkoordinasi dan pembagian informasi untuk mengurangi audit sosial yang berulang. Audit SMETA merupakan “prosedur audit yang merupakan kompilasi dari praktik yang baik dalam teknik audit etis” dengan standar ketenagakerjaan berdasarkan Kode Etik Ethical Trading Initiative (ETI).

SEDEX beroperasi menggunakan model peningkatan kontinu. Hal ini berarti tidak ada sertifikasi (tidak ada Lulus/Gagal). Alih-alih, entitas yang menginginkan audit menetapkan kriteria yang harus dipatuhi oleh supplier dalam hal: cakupan audit, frekuensi, kompetensi auditor dan derajat berat masalah. Auditor menilai kinerja dari suatu lokasi terhadap elemen audit berbeda dan mengunggah hasilnya ke platform.

MSC memiliki keanggotaan SEDEX yang memungkinkan MSC untuk berhubungan dengan supplier (pemilik sertifikat) dan menetapkan kriteria, termasuk masalah Business Critical yang membutuhkan aksi/tindakan segera. Seluruh supplier (pemilik sertifikat Rantai Pengawasan) harus bertautan ke MSC melalui platform SEDEX dan mengatur hak akses untuk dapat melihat segala informasi.

Audit SMETA harus diunggah ke SEDEX dan harus dibagikan dengan MSC. MSC telah menetapkan frekuensi audit ke tahunan untuk menyelaraskan dengan frekuensi audit pengawasan/*surveilans* Rantai Pengawasan. Sehingga, audit SEDEX SMETA akan diwajibkan setiap tahun.

Etika Perdagangan BRCGS dan Standar Sumber yang Bertanggung Jawab (*Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard*)

Etika Perdagangan BRCGS dan Standar Sumber yang Bertanggung Jawab (*Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard*) dikembangkan untuk memungkinkan supplier untuk menunjukkan bahwa barang dan/atau layanan yang dijual diproduksi secara etis. Kriteria garis besar standar yang diperlukan supaya suatu lokasi dapat memenuhi kewajiban legal dan moral kepada pekerja, menjamin tempat dan fasilitas aman dan tidak membahayakan kesehatan pekerja, dan melindungi pekerjaan dan hak asasi mereka. Standar ini telah diakui oleh Consumer Goods Forum's dari Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI).

Etika Perdagangan BRCGS dan Standar Sumber yang Bertanggung Jawab (*Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard*) beroperasi dengan model sertifikasi Lulus/Gagal (seperti program Perikanan dan Rantai Pengawasan MSC) dan mewajibkan entitas untuk memenuhi seluruh ketentuan spesifik supaya dapat lolos.

Akhir dokumen

Teks berbahasa Inggris dari Ketentuan Eligibilitas Tenaga Kerja MSC dan dokumen-dokumen skema MSC lainnya akan berlaku dalam segala hal. Bilamana terdapat keraguan terhadap persyaratan-persyaratan dan pemaknaannya, kunjungi laman web MSC untuk mengakses semua dokumen-dokumen skema tersebut.